

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat dengan baik, namun tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan dengan baik. Istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi juga merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Menginterpretasikan dan menetapkan suatu kebijakan sebelum diimplementasikan ialah langkah awal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan suatu capaian seperti program yang telah dipilah sedemikian rupa sebelum adanya penetapan. Melakukan imterpretasi tersebut berkenaan dengan mendefinisikan atau mengatur metode-metode untuk melaksanakan program. Program yang memberi peluang kepada pemerintah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah memiliki banyak bentuk dan macam, salah satunya terkait kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembuatan ataupun pengimplementasian perlu dilandasi oleh kebijakan yang pro atau sesuai bukan hanya untuk satu daerah namun untuk daerah-daerah lainnya yang

sesuai sehingga tidak terjadi kesenjangan akan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif atau sudut pandang dalam proses implementasi kebijakan atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan perilaku birokrat dalam pemberian layanan atau jasa tertentu kepada masyarakat dan mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Maka dari itu dalam implementasi suatu program khususnya yang melibatkan organisasi/instansi pemerintah maka fokus analisa implementasi kebijakan akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapat keputusan serta dalam upaya memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Mengenai suatu kebijakan yang bersifat pembangunan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan yang dilandasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 (2012), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terkait dengan visi pemerintah dan rencana kerja pemerintah yang disebutkan diatas dan dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, pemerintah

menerbitkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk penerima Program Indonesia Pintar yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya disekolah.

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya partisipasi sekolah, berkurangnya kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat, serta terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena adanya dukungan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Dengan demikian, implementasi Program Indonesia Pintar tidak hanya berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Data terbaru Program Indonesia Pintar (PIP), penyaluran bantuan pendidikan masih terus dilakukan hingga tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan tahun 2026. Di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penerima bantuan PIP di beberapa kabupaten mencapai ribuan siswa dengan total dana mencapai miliaran rupiah. Sebagai contoh, di salah satu kabupaten tercatat sebanyak 10.476 siswa penerima dengan total dana sekitar Rp6,7 miliar, sedangkan di kabupaten lain mencapai 9.360 siswa dengan total dana sekitar Rp7,5 miliar . Secara nasional, pada tahun 2025 program ini telah menjangkau lebih dari 18,5 juta siswa dengan anggaran sekitar Rp13,36 triliun, dan pada

tahun 2026 pemerintah bahkan memperluas sasaran hingga jenjang pendidikan yang lebih awal . Hal ini menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan program strategis yang terus ditingkatkan untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan.

Secara lebih spesifik di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) juga menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data penyaluran PIP tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan tahun 2026, jumlah penerima bantuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 10.476 siswa dengan total dana sekitar Rp6,7 miliar dan sekolah menengah kejuruan sebanyak 984 siswa.

Gambar 1.1 Data Penerima PIP di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jenjang		Disalurkan	Pemberian	Pemberian Dari Aktivasi Nominasi	Pemberian Relaksasi
Kab. Hulu Sungai Utara		Detail			
SD	Siswa	6.790	4.837	863	1.090
SD	Rp	2.724.300.000	1.971.675.000	388.125.000	364.500.000
SMP	Siswa	1.862	1.593	97	172
SMP	Rp	1.140.375.000	961.500.000	72.375.000	106.500.000
SMA	Siswa	840	417	38	385
SMA	Rp	1.329.300.000	582.300.000	68.400.000	678.600.000
SMK	Siswa	984	537	29	418
SMK	Rp	1.519.200.000	736.200.000	52.200.000	730.800.000
Total	Siswa	10.476	7.384	1.027	2.065
	Rp	6.713.175.000	4.251.675.000	581.100.000	1.880.400.000

Sumber :

https://pip.kemendikdasmen.go.id/penyaluran/kabupaten/15?tahun=2025&utm_source=.com

Berdasarkan data di MIN 22 Kabupaten Hulu Sungai Utara, jumlah peserta didik yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tercatat sebanyak 27 siswa dari total 162 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 16,7% dari keseluruhan siswa di sekolah tersebut merupakan penerima bantuan PIP. Lebih lanjut, keberadaan 27 siswa penerima PIP ini memiliki dampak yang cukup penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, khususnya dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu namun dalam implementasinya masih terkendala beberapa hal seperti:

1. ketidaktepatan sasaran penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di MIN 22 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kerna masih ada siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan dari PIP serta adanya penerima yang memiliki latar belakang ekonomi yang mampu.
2. Terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi ekonomi siswa yang sebenarnya di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kecemburuan sosial dan ketidakpuasan di kalangan orang tua maupun siswa, karena terdapat siswa yang dinilai layak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya, sementara sebagian penerima dianggap berasal dari keluarga yang kondisinya lebih mampu.
3. “Ditemukan adanya perpindahan siswa setelah ditetapkan sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Kondisi ini menyebabkan kendala dalam proses administrasi penyaluran dana serta pembaruan data penerima, sehingga pelaksanaan program menjadi kurang optimal.”

Dari pembahasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Mendukung Akses Pendidikan bagi Siswa di MIN 22 Hulu Sungai Utara.**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa hasil penelitian maka penelitian ini akan dipersempit sehingga fokus penelitian pada penelitian ini hanya meliputi atau hanya tertuju pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Joko Pramono, 2020:4-5) yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang akan di jadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Mendukung Akses Pendidikan bagi Siswa di MIN 22 Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Mendukung Akses Pendidikan bagi Siswa di MIN 22 Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung akses pendidikan bagi Siswa di MIN 22 Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung akses pendidikan bagi Siswa di MIN 22 Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan keilmuan Administrasi Publik, khususnya dalam kajian kebijakan pendidikan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait implementasi kebijakan, model-model kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan.

b. Secara Praktis

- 1) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran terhadap kebijakan pemerintah terkait pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- 2) Karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah di peroleh peneliti selama belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Amuntai dengan Program Studi Administrasi Publik (S1) dan semoga karya ilmiah ini dapat berguna sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

c. Segi Akademik

Memberikan khazanah perbendaharaan karya ilmiah pada Perpustakaan STIA Amuntai dan cara menyelesaikan Pendidikan Program Studi Administrasi Publik (S1) di STIA Amuntai khususnya dibidang implementasi kebijakan.

